

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kajian studi keamanan merupakan studi tentang ancaman, penggunaan, dan kontrol kekuatan militer sehingga kajian keamanan melihat bagaimana kekuatan militer dapat mempengaruhi perilaku negara yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keputusan pertahanan negara lain (Walt, 2012).

Dalam sistem internasional yang bersifat anarki, ancaman militer selalu ada dengan ketika negara merasa adanya ancaman militer maka negara tersebut akan menyesuaikan strategi pertahanannya untuk menjaga keamanan nasional, dalam hal ini kawasan menjadi tempat interaksi bagi negara negara dengan keamanan suatu negara selalu berkaitan dengan keamanan negara lain di sekitarnya yang membuat ancaman dapat menyebar serta mempengaruhi cara negara memandang situasi di sekitarnya (Buzan & Ole, 2004).

Asia Timur memiliki dinamika keamanan yang terus berubah dan sering memicu ketegangan karena adanya faktor sejarah juga perbedaan ideologi yang membuat kawasan ini lebih sensitif dibanding wilayah lain di Asia. Kondisi ini mendorong negara negara di kawasan Asia Timur untuk saling mengawasi dan curiga yang membuat negara di kawasan Asia Timur memperkuat kemampuan militer ataupun sistem pertahanan (Najeri, 2018).

Meskipun begitu, Asia Timur pernah berada dalam kondisi stabil setelah Perang Dunia II karena negara di kawasan mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan menahan ekspansi militer dengan periode ini dikenal sebagai “*Long Peace*” karena rendahnya potensi konflik militer antarnegara Asia Timur (Schortgen, 2024).

Namun stabilitas keamanan kawasan Asia Timur mulai berubah setelah kemampuan militer China meningkat secara signifikan, sehingga sejak 2015 China melakukan modernisasi militer untuk membangun kekuatan militer modern karena pemerintah China dirasa bahwa kapabilitas People's Liberation Army (PLA) tertinggal serta memiliki keterbatasan logistik dan masalah korupsi internal yang melemahkan kapabilitas PLA (Saunders & Wuthnow, 2019).

Dalam hal ini modernisasi militer merupakan proses transformasi dan pembaruan angkatan bersenjata suatu negara melalui adanya adopsi doktrin baru, dan teknologi. Sehingga modernisasi militer tidak hanya sebagai peningkatan jumlah persenjataan, melainkan sebagai proses pembaharuan menyeluruh yang mencakup perubahan doktrin, restrukturisasi unit militer, hingga didukung kebijakan pertahanan negara.

Dengan modernisasi ini diarahkan untuk mengejar ambisi pada tahun 2049 sebagai negara yang memiliki kemampuan militer yang modern dan kelas dunia, selain itu modernisasi ini juga didorong dengan adanya persepsi ancaman yang di rasakan oleh China karena kehadiran militer Amerika di kawasan yang membuat pemerintah China merasa harus merespon dengan melakukan modernisasi militer dengan tujuannya adalah sebagai bagian dari upaya *self defense* (Char, 2021).

Hal tersebut dinyatakan langsung oleh Wu Qian sebagai juru bicara kementerian pertahanan China hingga periode 2025 *“the modernization process of national defense and the military is compatible with the national modernization process, to comprehensively improve the strategic capabilities of defending national sovereignty, security and development interests”* (Weichao, 2024).

Dengan komitmen terhadap modernisasi tersebut terlihat dari peningkatan anggaran pertahanan untuk mempercepat mencapai tujuan mereka, dimana anggaran China meningkat rata-rata 7,49% setiap tahunnya hingga mencapai \$247 miliar pada 2025, namun besaran anggaran tersebut diperkirakan tidak mencerminkan pengeluaran militer yang sesungguhnya karena berdasarkan estimasi Stockholm International Peace Research Institute (2025) angka sebenarnya berkisar antara \$318 miliar hingga \$471 miliar, karena China dianggap tidak memasukkan sejumlah pengeluaran seperti biaya research and development dan pembelian senjata tertentu dalam anggaran resmi yang dipublikasikan (SIPRI, 2025).

Selain itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat merasa anggaran militer China jauh lebih besar dibandingkan angka resmi yang dipublikasi oleh pemerintah China mengklaim selisih antara angka yang di publikasi dengan angka asli bisa lebih dari 40%, yang memuat China dianggap tidak transparan (SIPRI, 2025).

Gambar 1. 1 Estimasi Anggaran Pertahanan China dari Sumber Independen



Sumber: (SIPRI, 2025)

Dengan peningkatan anggaran ini bukan hanya ditujukan untuk pengadaan alutsista tetapi juga untuk meningkatkan kapabilitas PLA dengan menjadikan adanya beberapa unit militer baru seperti pembentukan People's Liberation Army Rocket Force (PLARF), People Liberation Army Strategic Support Force (PLASSF) yang memiliki tugas utama nya adalah mengintegrasikan kemampuan siber dan antariksa (Char, 2021).

Dengan pembentukan PLA Rocket Force ini menunjukkan bahwa pentingnya peran rudal dan nuklir dalam strategi militer China, peran nuklir dalam militer China terlihat dengan jumlah nuklir yang terus bertambah setiap tahunnya, dimana dalam dokumen Defense of Japan 2025 memperkirakan bahwa China kini memiliki sekitar 600 nuklir, dengan jumlah tersebut akan meningkat hingga 1.000 nuklir pada tahun 2030 (Ministry of Defense Japan, 2025).

Selain penguatan sektor senjata nuklir, modernisasi yang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kapabilitas militer secara keseluruhan bisa dilihat melalui meningkatnya jumlah alutsista dan unit tempur yang menunjukkan bahwa PLA sedang dipersiapkan menjadi kekuatan militer yang lebih modern dan mampu beroperasi lebih efektif dalam menghadapi ancaman yang mungkin akan muncul.

Tabel 1. 1 Perkembangan Kapabilitas Militer China

	Ofensif			
	Defensif			
	Dual use			
<i>Combat Unit and Personnel Strength</i>				
	2013	2014	2015	2021
<i>Milions of Personnel (Active)</i>	1.25	1.25	1.25	1.04
<i>Group Armies</i>	18	18	18	18
<i>Artillery Brigades</i>	17	17	22	15
<i>Airbone Brigades</i>	3	3	3	7
<i>Marine Brigades</i>	3	3	3	8
Alutsista Darat				
	2013	2014	2015	2021
<i>Tanks</i>	7.000	7.000	6.947	6300
<i>Artillery Pieces</i>	8.000	8.000	7.953	7.000
Alutsista Laut				
	2013	2014	2015	2021
<i>Aircraft Carriers</i>	1	1	1	2
<i>Cruisers</i>	N/A	N/A	N/A	2
<i>Destroyers</i>	23	24	21	32
<i>Frigates</i>	52	49	52	48
<i>Corvettes</i>	N/A	8	15	51
<i>Diesel Attack Submarines</i>	49	51	53	56
<i>Nuclear Attack Submarines</i>	5	5	5	9
<i>Ballistic Attack Submarines</i>	N/A	N/A	N/A	6
<i>Coastal Patrol (Missile)</i>	85	85	86	86
Alutsista Udara				
	2013	2014	2015	2021
<i>Fighters</i>	1.700	1.700	1.700	2.800
<i>Bombers</i>	600	400	400	450
<i>Special Mission Aircraft</i>	N/A	N/A	115	150

Sumber: (Khasanah, 2022)

Meskipun China menyatakan bahwa modernisasi militernya sebagai langkah *self-defense*, Jepang sebagai negara yang berada di kawasan yang sama justru sulit menilai apakah kekuatan militer yang dibangun bersifat defensif atau ofensif karena ketidaksesuaian antara niat defensif dengan kapabilitas ofensif yang sedang dibangun oleh China (Bartels, 2022).

Dalam hal tersebut, Jepang berada pada posisi yang paling rentan dibandingkan negara lain di kawasan, karena Jepang menghadapi kombinasi berupa kedekatan geografis langsung dengan China, serta memiliki objek sengketa wilayah yang masih aktif di Kepulauan Senkaku, dan memiliki keterbatasan pengembangan kapabilitas militer yang membuat Jepang tidak dapat merespons ancaman secara agresif. Terlebih lagi, posisi Jepang sebagai aliansi utama Amerika Serikat di kawasan Asia Timur menjadikannya sebagai salah satu target strategis bagi China di kawasan, dengan kombinasi faktor tersebut, sehingga Jepang menjadi negara yang terdampak langsung oleh modernisasi militer China dibandingkan negara lain di kawasan Asia Timur (Ministry of Defense Japan, 2025).

Kekhawatiran Jepang meningkat karena transparansi anggaran pertahanan China yang rendah bagi publik sehingga sejumlah pihak mengklaim bahwa anggaran pertahanan China lebih besar dari angka yang di publikasi, dengan kemampuan China yang dapat memproduksi sebagian besar persenjataannya sendiri sehingga biaya produksi tersebut tidak dimasukkan dalam laporan resmi yang membuat negara lain mengasumsikan skenario terburuk (Bartels, 2022).

Karena hal tersebut Jepang memandang modernisasi militer China sebagai ancaman serius bagi keamanan nasionalnya dengan menempatkan China sebagai ancaman utama mereka di Kawasan Asia Timur, pandangan ini secara jelas dalam dokumen pertahanan mereka yakni *Defense of Japan (2025)* yang menyatakan bahwa "*unprecedented and the greatest strategic challenge*" sehingga peningkatan kemampuan dan aktivitas militer China merupakan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya sehingga Jepang perlu merespons dengan seluruh kemampuannya termasuk melalui kerja sama dengan negara lain.

Bagi Jepang, modernisasi militer China tidak hanya soal penambahan senjata tetapi soal kemungkinan penggunaan kekuatan militer tersebut untuk menekan dan mengubah status quo wilayah secara sepihak dalam sengketa di Kepulauan Senkaku dan dengan kedekatan geografis antar negara menjadikan peningkatan kemampuan militer China meningkatkan ancaman dan menurunkan keamanan Jepang (Ministry of Defense Japan, 2025).

Terlebih lagi, persepsi ancaman Jepang diperkuat oleh aktivitas militer China di sekitar Kepulauan Senkaku yang dipandang Jepang sebagai upaya dari China

untuk melemahkan kontrolnya melalui keberadaan militer di wilayah sengketa (Ministry of Defense Japan, 2025).

Dengan pada Agustus 2022 lima dari sembilan rudal balistik diluncurkan sebagai bagian dari latihan militer China mendarat di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Jepang yang salah satunya jatuh hanya sekitar 80 km dari Pulau Yonaguni sehingga insiden ini perhatian serius bagi pemerintah Jepang karena menyangkut keamanan dan keselamatan warganya (Ministry of Defense Japan, 2025).

Dengan meningkatnya ancaman China tersebut mendorong perubahan strategi keamanan Jepang sejak Perang Dunia II dimana selama puluhan tahun Jepang mempertahankan postur pertahanan yang pasif karena dibatasi oleh konstitusi pasal 9 tahun 1947 yang menekankan bahwa kemampuan militer hanya digunakan untuk bertahan (Ministry of Defense Japan, 2025).

Perubahan tersebut terlihat dari keberadaan dalam dua dokumen pertahanan yaitu National Security Strategy (NSS) dan National Defense Strategy (NDS) yang menandai pergeseran dari strategi pertahanan yang pasif ke arah active defense, yaitu strategi pertahanan yang menuntut kemampuan untuk mencegah dan menetralkan serangan sebelum ancaman memasuki wilayah Jepang.

Namun, ada perbedaan dari kedua dokumen pertahanan Jepang tersebut yang terletak pada fokus tujuannya dimana NSS berperan sebagai *blueprint* yang menetapkan tujuan keamanan negara secara menyeluruh mencakup keamanan dari ancaman militer hingga isu kemananan non militer seperti *human security*, ekonomi, sosial, *climate change*. Sementara itu, NDS berfungsi sebagai panduan atau guideline khusus untuk sektor militer dengan bagaimana cara Jepang untuk mencapai tujuan keamanan militer yang ada di NSS sehingga posisi NDS berada di bawah NSS sebagai pelaksana strategi pertahanan negara.

Keberadaan dua dokumen strategis tersebut menandakan bahwa Jepang tidak lagi menempatkan pencegahan konflik hanya pada sistem pertahanan yang pasif dimana dalam dokumen National Security of Strategy salah satu tujuan utama memperkuat pertahanan adalah agar negara lain menyadari bahwa jika terjadi konflik dengan Jepang tidak akan membawa keuntungan dan biaya yang dibutuhkan terlalu tinggi bagi agresor atau dengan kata lain Jepang ingin

membangun kekuatan pertahanan untuk mencegah lawan yang memiliki niat untuk melakukan agresi (National Security Strategy, 2022).

Dalam dokumen National Security of Strategy (2022), Jepang mengakui bahwa kemampuan pertahanan yang ada saat ini dianggap tidak cukup untuk menghadapi kemampuan militer yang dimiliki oleh China jika mengunakanya untuk menyerang Jepang.

Dengan Pengakuan mengenai keterbatasan sistem pertahanan tersebut mengindikasikan bahwa strategi *defense oriented* yang selama ini gunakan oleh Jepang mulai kewalahan menghadapi kapabilitas militer negara lain seperti China sehingga sistem pertahanan tersebut memicu timbulnya gap kekuatan antar negara yang mendorong Jepang untuk merespon ketertinggalan tersebut.

Guna menutup kesenjangan tersebut, pemerintah Jepang mengalokasikan anggaran sebesar 43 triliun yen untuk periode Tahun Anggaran 2022-2027 dengan tujuan memperkuat kemampuan pertahanannya. Besarnya anggaran pertahanan Jepang ini menunjukkan peningkatan lebih dari 2,5 kali lipat dibanding dengan periode sebelumnya (2019-2022) yang alokasinya hanya berada di kisaran 17,2 triliun yen, meskipun telah melakukan berbagai upaya peningkatan pertahanan tersebut, kesenjangan kapabilitas antara Jepang dengan China tetap signifikan dan belum dapat ditutupi secara mandiri (Ministry of Defense Japan, 2025).

Tabel 1. 2 Anggaran Pertahanan Jepang

Tahun	Besaran Anggaran (¥, Yen)
2022	¥5.4 Triliun
2023	¥6.8 Triliun
2024	¥7.95 Triliun
2025	¥8.7 Triliun

Sumber: (Ministry of Defense Japan, 2025)

Berdasarkan dinamika tersebut terlihat bahwa peningkatan kapabilitas militer China secara langsung mempengaruhi persepsi ancaman bagi Jepang yang merasa cepatnya peningkatan kemampuan militer China membuat adanya gap kemampuan sehingga dapat mengganggu keamanan nasionalnya, dimana gap tersebut tidak hanya terlihat dari jumlah alutsista saja melainkan juga kualitas yang terus berkembang melalui modernisasi yang dilakukan China.

Meskipun pemerintah China secara konsisten menyatakan bahwa modernisasi militernya ditujukan untuk langkah defensif, namun langkah tersebut justru menimbulkan kekhawatiran bagi Jepang yang melihat bahwa modernisasi tersebut merupakan langkah ofensif yang secara langsung mengancam keamanan nasionalnya sehingga memicu munculnya respons berupa pergeseran strategi pertahanan yang lebih proaktif.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji dinamika keamanan antara Jepang dan China, sebagian besar penelitian tersebut menggunakan kerangka *balance of power*, *security dilemma*, *regional security complex* atau realisme untuk menjelaskan respons Jepang tanpa mengurai secara komprehensif mengapa China secara spesifik dipersepsikan sebagai ancaman, dan tanpa menganalisis bagaimana modernisasi militer China yang memicu terbentuknya persepsi ancaman tersebut.

Sehingga dengan celah teoritis tersebut yang mendorong penelitian ini untuk menggunakan teori Military Technical Revolution yang dikembangkan oleh Krepinevich (2002) dan teori Balance of Threat yang dikembangkan oleh Walt (1990) sebagai kerangka analitis yang memungkinkan penjelasan yang lebih komprehensif tentang bagaimana modernisasi militer China membentuk persepsi ancaman Jepang.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dinamika keamanan dari latar belakang masalah yang ada, maka dari itu dalam penelitian ini berupaya untuk menjawab pertanyaan penelitian:

1. Berdasarkan *Balance of Threat Theory*, bagaimana persepsi ancaman Jepang terhadap China yang dipicu oleh modernisasi militer terbentuk?

1.3 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada periode 2020 hingga 2025. Rentang waktu ini dipilih karena pada periode tersebut modernisasi militer China menunjukkan peningkatan yang signifikan melalui berbagai perubahan postur militer kedua negara.

Secara geografis, penelitian ini difokuskan pada kawasan Asia Timur dengan penekanan pada dinamika keamanan antara Jepang dan China. Kawasan ini dipilih karena menjadi titik yang paling sensitif terhadap perubahan kekuatan militer kedua negara dan memiliki implikasi langsung terhadap kepentingan keamanan nasional Jepang.

Cakupan isu penelitian dibatasi pada dua aspek utama, yaitu analisis modernisasi militer China berdasarkan teori Military Technical Revolution, serta pembentukan persepsi ancaman Jepang terhadap modernisasi militer China berdasarkan teori Balance of Threat.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan program Sarjana Ilmu Hubungan Internasional Universitas Pasundan melalui penyusunan skripsi, sekaligus menjadi sarana penerapan pengetahuan teoritis yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.

Secara khusus, penelitian ini memiliki dua tujuan yang selaras dengan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, yaitu menganalisis modernisasi militer China berdasarkan teori Military Technical Revolution dan bagaimana persepsi ancaman Jepang terbentuk yang dipicu oleh modernisasi tersebut dengan menggunakan teori Balance of Threat.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah teoritis dalam literatur keamanan Asia Timur melalui penggunaan kombinasi teori Military Technical Revolution dan Balance of Threat Theory sebagai kerangka analitis yang belum pernah digunakan secara bersamaan dalam penelitian-penelitian sebelumnya mengenai dinamika keamanan Jepang-China. Dengan pendekatan kombinasi

tersebut, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa maupun peneliti yang ingin memahami bagaimana modernisasi militer suatu negara dapat membentuk persepsi ancaman negara lain.

Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran mengenai modernisasi militer China serta implikasinya terhadap persepsi ancaman Jepang, sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi bahan dalam memahami dinamika keamanan di Asia Timur.

1.5 Kerangka Teoritis dan Konseptual

1.5.1 *Military Technical Revolution Theory*

Teori *Military-Technical Revolution* yang dikembangkan oleh Andrew Krepinevich (2002) merupakan teori yang digunakan untuk menganalisis serta memahami modernisasi ataupun transformasi militer modern, dimana berbeda dengan pendekatan tradisional yang memandang modernisasi militer hanya sebagai pengadaan ataupun akumulasi alutsista, karena menurut Krepinevich “*the application of new technologies into military systems combines with innovative operational concepts and organizational adaptation to alter fundamentally the character and conduct of military operations*” sehingga modernisasi militer bukan sekadar pengadaan alutsista saja, melainkan harus dibarengi dengan inovasi teknologi, *organizational adaptation* (struktur organisasi baru) dan *operational adaptation* (strategi ataupun domain baru) sehingga mampu mengubah karakter dan secara langsung meningkatkan kapabilitas militer secara keseluruhan.

Dengan modernisasi militer merupakan bentuk *strategic behavior* sehingga penuh perhitungan dan disengaja oleh negara untuk mencapai tujuan tertentu, meskipun negara telah memiliki keunggulan alutsista yang mungkin akan memberikan keunggulan taktikal namun tidak akan secara otomatis menghasilkan yang maksimal jika tidak dibarengi dengan tujuan strategis yang jelas. Sehingga modernisasi yang dilakukan oleh suatu negara harus disertai dengan *Technological Change, Operational Innovation, Organizational adaptation* (Cuoco, 2010).

Technological Change merujuk pada adanya inovasi teknologi yang diintegrasikan ke dalam sistem militer dengan teknologi tersebut tidak hanya sebagai alat pendukung tetapi juga menjadi bagian yang mempengaruhi kapabilitas

militer, sehingga dengan melalui integrasi teknologi tersebut negara dapat memperoleh kapasitas material baru yang secara langsung meningkatkan efektifitas operasionalnya (Krepinevich, 2002).

Dengan keberadaan inovasi teknologi merupakan kewajiban bagi negara ketika melakukan modernisasi militer yang dapat merubah kemampuan militernya, karena inovasi teknologi seperti sistem informasi serta jaringan komunikasi dapat memberikan kemampuan bagi militer untuk mendapatkan, mengolah, dan mendistribusikan informasi secara lebih cepat dimana kondisi ini memungkinkan konektivitas antar unit militer sehingga proses operasional dapat berlangsung secara lebih efektif juga teknologi seperti *precision guided munitions* yang mampu meningkatkan jangkauan dan akurasi alutsista dengan dukungan sistem *scanning* menjadikan karakter militer bergeser menjadi *hidiers* dan *finders* dimana setiap target yang berhasil diidentifikasi dan dilacak selama masih berada dalam jangkauan akan menghadapi risiko yang sangat tinggi (Krepinevich, 2002).

Operational Innovation sebagaimana menurut Andrew Krepinevich (2002) bahwa "*layering new systems on old doctrine merely allows you to become more effective at the margins within the old operational paradigm*" sehingga modernisasi militer yang utuh menuntut adanya pengembangan doktrin ataupun taktik baru untuk memaksimalkan potensi dari sistem pertahanan yang telah dikembangkan, dimana *Operational Innovation* berfungsi sebagai panduan ataupun cara militer bekerja karena menurut Krepinevich "*a military-technical revolution occurs, the 'rules of the game' are fundamentally altered*" sehingga kemajuan teknologi dan alutsista tidak akan secara otomatis meningkatkan kemampuan militer jika operasional militernya tidak mengalami perubahan.

Dengan tujuannya adalah untuk mengubah karakter operasional militer ketika dalam situasi konflik dari yang bersifat tradisional menjadi modern, dimana integrasi teknologi informasi dan alutsista modern dianggap mampu melumpuhkan seluruh sistem musuh melalui koordinasi berbagai domain tempur yang terintegrasi (Krepinevich, 2002).

Organizational Adaptation merupakan proses restrukturisasi militer untuk mendukung operasional baru sekaligus sebagai upaya mengelola kompleksitas yang muncul akibat integrasi teknologi ke dalam sistem militer, dimana

sebagaimana menurut Krepinevich (2002) “*the revolution is fully realized only when innovative operational concepts are perfected to exploit systems based on new technologies, and when organizations are created to execute the new operations effectively*” sehingga jika struktur lama gagal untuk beradaptasi akan menyebabkan permasalahan karena seringkali militer memiliki sistem informasi yang modern namun terhambat oleh struktur organisasi militer yang sudah usang dan tidak mampu mengoptimalkan potensi militer yang ada.

Dengan *organizational adaptation* menuntut adanya penyesuaian birokrasi agar lebih fleksibel dan terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas operasional militer, dimana hal ini dilakukan melalui sistem komando antar domain yang terpusat sehingga mampu merespons situasi dengan cepat yang dalam konteks militer modern dicapai melalui penyederhanaan struktur organisasi dengan menghilangkan tingkatan organisasi yang tidak diperlukan sehingga memungkinkan lebih banyak pihak untuk mengakses informasi yang mereka butuhkan secara langsung (Krepinevich, 2002).

Dengan demikian, sebagaimana menurut Krepinevich (2002) “*Innovations in technology make a military revolution possible, but the revolution itself takes place only when new concepts of operations develop, and in many cases new military organizations are created*” sehingga ketiga variabel dalam teori Military Technical Revolution terjadi secara berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam proses modernisasi atau transformasi militer, dimana *technological change* mendorong munculnya inovasi teknologi untuk diintegrasikan kedalam sistem militer atau sistem persenjataan baru bagi militer yang perkembangan tersebut kemudian mengharuskan adanya *operational innovation* yaitu munculnya metode operasi baru yang terlihat dalam perubahan operasional atau strategi militer, yang pada akhirnya memaksa terjadinya *organizational adaptation* atau penyesuaian terhadap struktur militer yang memungkinkan pembentukan unit dan matra baru.

1.5.2 Balance of Threat Theory

Teori *Balance of Threat* (BoT) yang dikembangkan oleh Stephen M. Walt dalam buku *The Origins of Alliances* (1990), dengan teori *Balance of Threat* berangkat dari asumsi realisme yang memandang negara sebagai aktor utama dalam

politik internasional. Teori ini melihat bahwa negara berada dalam sistem internasional yang bersifat anarkis atau tidak adanya otoritas tertinggi.

Dalam sistem yang anarki, tujuan utama negara adalah bertahan hidup (*survival*) sehingga prioritas utama setiap negara adalah untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas nasionalnya. Oleh karena itu, negara akan membentuk aliansi untuk melindungi diri mereka sendiri (Walt, 1990).

Aliansi ini dibentuk sebagai respon untuk menyeimbangkan ancaman (*Threats*) untuk negara yang dianggap paling mengancam dan bukan sekadar menyeimbangkan kekuatan (*Power*) yang berbeda seperti apa yang ada dalam teori *balance of power*. Namun Walt (1990) berargumen bahwa negara tidak secara otomatis menyeimbangkan kekuatannya dengan hanya melihat negara itu adalah negara terkuat, melainkan akan menyeimbangkan kekuatannya dengan negara yang dianggap paling mengancam meskipun negara tersebut bukan negara terkuat.

Sehingga menurut Walt (1990) negara tidak akan memutuskan tindakan nya sebelum mengukur tingkat ancaman yang telah dirasakan dari suatu negara berdasarkan empat utama faktor yaitu *aggregate power*, *geographic proximity*, *offensive power*, dan *aggressive intentions*.

Pertama, *Aggregate power* merupakan akumulasi dari sumber daya yang dimiliki suatu negara yang mencakup jumlah populasi, ekonomi, kapabilitas militer, serta tingkat kemajuan teknologi. Dengan besarnya kekuatan sumber daya ini dapat menentukan kapasitas suatu negara secara material untuk bertindak, dimana semakin besar sumber daya yang tersedia maka semakin besar pula potensi negara tersebut untuk memengaruhi negara lain atau kawasannya, karena dengan akumulasi sumber daya yang besar akan memberikan negara kemampuan guna memaksakan kehendak dan dapat menimbulkan kerugian bagi negara lain. (Walt, 1990).

Kedua, *Geographic Proximity* mengacu pada jarak antara satu negara dengan negara lain dimana menurut Walt Ancaman paling serius biasanya datang dari negara yang jaraknya terdekat, karena kedekatan geografis dapat menentukan kemudahan dan kecepatan suatu negara dalam menyerang negara lain (Walt, 1990).

Negara negara yang saling berdekatan biasanya lebih mudah terjadi konflik seperti sengketa wilayah dan perebutan pengaruh kawasan, sehingga negara yang jaraknya dekat sering kali dipersepsikan lebih mengancam dibandingkan negara yang kekuatannya lebih besar namun jarak geografisnya jauh. Dengan kata lain, ancaman tidak hanya ditentukan oleh besarnya kekuatan negara saja melainkan dipengaruhi oleh tingkat kesulitan untuk memobilisasi kekuatan yang dapat digunakan secara langsung dan cepat sehingga negara yang dekat secara geografis memiliki keunggulan karena “keberadaannya” yang membuat potensi ancaman terasa lebih ada (Walt, 1990).

Ketiga, *Offensive power* merupakan kemampuan suatu negara untuk menggunakan kekuatan yang dimilikinya guna menyerang dan mengancam keamanan negara lain. Hal ini berbeda dengan *aggregate power* karena *Offensive power* bukan menekankan pada besarnya sumber daya melainkan seberapa efektif sumber daya tersebut dapat digunakan sebagai kekuatan yang dapat menghancurkan lawan, sehingga negara dengan sumber daya besar belum tentu memiliki kapabilitas ofensif yang tinggi, sementara negara dengan sumber daya terbatas dapat dipersepsikan sangat mengancam apabila memiliki kemampuan ofensifnya efektif dan destruktif (Walt, 1990).

Terakhir adalah *Aggressive Intentions* yang merujuk pada penilaian suatu negara terhadap tujuan dan orientasi kebijakan negara lain di mana fokus utama variabel ini adalah untuk menentukan apakah kapabilitas yang dimiliki suatu negara akan digunakan memang untuk tujuan defensif atau justru ditujukan untuk melakukan agresi atau ofensif, khususnya apabila terdapat perbedaan antara niat yang dinyatakan dengan tindakan yang dilakukan, sehingga dalam variabel ini tidak mengukur niat objektif suatu negara melainkan bagaimana niat tersebut dipersepsikan oleh negara lain (Walt, 1990).

Berbeda dengan *aggregate power* dan *offensive power* yang dapat diukur secara materil melalui kuantitas maupun kualitas sumber daya, *aggressive intentions* berasal dari proses penilaian dan interpretasi negara terhadap tujuan serta perilaku negara lain, sehingga negara yang memiliki kekuatan besar sekalipun bisa saja tidak menimbulkan rasa terancam apabila tindakan-tindakannya dianggap tidak provokatif, namun negara dengan kapabilitas yang lebih kecil dapat dikategorikan

sebagai ancaman nyata apabila perilakunya provokatif yang meyakinkan pihak lain akan adanya niat untuk melakukan agresi (Walt, 1990).

1.6 Asumsi Penelitian

Sistem internasional yang bersifat anarki mendorong negara untuk memiliki sifat *self help*, sehingga modernisasi militer China menjadi hal yang rasional dalam konteks keamanan karena adanya keterbatasan internal yang mempengaruhi China dalam merespon dinamika keamanan.

Namun dengan modernisasi China tersebut yang ditujukan sebagai upaya *self defense* justru menjadi salah satu faktor utama yang membentuk persepsi ancaman Jepang, berdasarkan teori *balance of threat* persepsi ancaman suatu negara dapat terbentuk karena empat faktor, yaitu *geographic proximity* antara kedua negara, *aggregate power* yang menciptakan kesenjangan sumber daya, *offensive power* yaitu sumber daya yang mampu mengancam wilayah Jepang, serta *aggressive intentions* yang terlihat dari pola perilaku yang agresif.

Sehingga, persepsi ancaman Jepang terbentuk bukan semata karena besarnya kekuatan China, melainkan karena kombinasi keempat variabel tersebut yang secara akumulatif menempatkan China sebagai ancaman utama bagi keamanan nasional Jepang dengan modernisasi militer yang memicu timbulnya gap kemampuan antara kedua negara.

1.7 Kerangka Analisis

Gambar 1. 2 Kerangka Analisis

